

**RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019**



**Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Panglima Batur No. 51 Kandangan 71211, Telpon (0517) 21242 Faxes. (0517) 21242**

**RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019**



**Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Panglima Batur No. 51 Kandangan 71211, Telpon (0517) 21242 Faxes. (0517) 21242**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah menyusun Rancangan Rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dimana sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sesuai Draf RPJMD Teknokratik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023 yang visi **“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sehati Plus CINTA “**.

Berkaitan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kesempatan ini menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Asas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
- 8) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stackholders*) tentang rencana pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Menjadi kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Keuangan Daerah serta Kesekretariatan;
- b. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- c. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan Hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, menjelaskan secara rinci, Evaluasi pelaksana Renja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Tahun lalu dan capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dan Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan secara rinci, Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), Program dan Kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Renja SKPD Tahun 2017 secara keseluruhan telah terakomodir dalam program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2017. Program Utama SKPD adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 4.236.226.950,- telah dilaksanakan dengan capaian Realisasi sebesar Rp. 2.585.328.489,- , secara rinci kegiatan – kegiatan program dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR	PAGU	REALISASI*	%
1. Penyusunan Standar Satuan Harga	76.200.000	61.275.000	81,00
2. Penyusunan APBD	332.950.000	208.202.000	62,53
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	30.460.000	3.230.000	10,60
4. Penyusunan Perubahan APBD	561.525.000	443.852.558	79,04
5. Penyusunan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15.790.000	3.925.000	24,86
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaks APBD	56.108.160	50.703.200	90,37
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	49.362.880	27.141.700	54,98
8. Penyusunan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah	255.200.000	234.180.000	91,76
9. Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis	46.870.400	45.727.000	97,56
10. Penyusunan Laporan Keuangan Pems	497.021.360	317.605.183	63,90
11. Penyusunan Laporan Triwulan Keuangan Daerah	5.990.400	5.982.183	99,87
12. Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial	54.800.000	47.738.000	87,11
13. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	323.325.000	245.184.588	75,83
14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	597.065.000	395.818.560	66,29
15. Penyediaan dok. PBB P2 dan BPHTB	97.926.000	95.131.750	97,15
16. Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis	256.052.000	237.825.800	92,88
17. Peningkatan Manajemen Aset /BMD	315.100.000	214.831.149	68,18
18. Inventarisasi Barang/ Aset Daerah	273.840.000	230.039.000	84,00
19. Pengamanan Barang/Aset Daerah	682.180.000	352.922.720	51,73
20. Penyusunan RKBMD dan RKPBM	175.936.000	37.645.300	21,40
21. Fasilitasi Majelis TP-TGR	60.750.000	36.559.000	60,18
22. Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	888.900.000	821.368.000	94,88
23. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	381.675.000	330.614.760	86,62
24. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21.370.000	-	-
25. Pendampingan Integrasi Sistem Perencanaan dgn Penganggaran			

2.1.1. Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bakeuda Triwulan I Kab. HSS Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Ket
1	2	3	4		5		6
1.	Meningkat nya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120,427,666,000	Rp.	Triwulan I	84,371,972,048	Sumber LRA per 31 Maret. 2018
		2. Persentasi SKPD Pengelola PAD yang mencapai target penerimaan	83	%	Triwulan I	56.52	$\frac{13}{23} \times 100$
		3. Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD	<09 Oktober 2018	Waktu	Triwulan I		
		4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	≤ 31 Maret 2017	Waktu	Triwulan I	31 Maret 2017	Lap. Keu Pemda Tahun 2016
		5. Persentasi Realisasi belanja langsung	94	%	Triwulan I	45.93%	Sumber LRA per 31 Maret. 2018
		6. Persentasi SP2D Dengan Sumber Dana dan Kode Rekening Yang Tepat	100	%	Triwulan I	100	$\frac{4.436}{4.436} \times 100$
2.	Meningkat nya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang	51	%	Triwulan I	50.86%	$\frac{2.976,6 \text{ M}}{2.851,3 \text{ M}} \times 100$
		2. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca	100	%	Triwulan I	104%	
3.	Terwujud nya Pelayanan Publik Yang Prima	1. Survey Kepuasan Masyarakat	85	Indeks	Triwulan I		Triwulan III
		2. Persentasi Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%	Triwulan I		Belum Ada Keluhan Masy yang masuk
		3. Persentase Temuan BPK/masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%	Triwulan I	100	$\frac{4}{4} \times 100$
		4. Predikat Penilaian AKIP	B	Kategori	Triwulan I	B	Sakip 2017

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kebijakan pembangunan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan urusan pemerintahan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Badan Keuangan Daerah mempunyai 5 (lima) Program yakni ; 4 (empat) program rutin dan 1 (satu) program operasional yang diimplementasikan dalam 45 (empat puluh lima) kegiatan. Kinerja yang sesuai SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tidak ada pada Badan Keuangan daerah sedangkan Pelayanan yang ada di Badan Keuangan Daerah antara lain meliputi :

1) Pelayanan Penerbitan SP2D

Pelayanan Penerbitan SP2D bagi Aparatur Sipil Negara dan Pihak Ketiga/Masyarakat saat ini sudah berjalan baik dengan didukung oleh Aplikasi SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan.

2) Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB

Pelayanan dalam pencetakan dan pembuatan PBB-P2 dan BPHTB serta pembayaran PBB-P2 dan BPHTB yang akan disetorkan ke Kas Daerah melalui aplikasi SIM PBB.

3) Penyaluran Bansos dan Hibah

Penyaluran Hibah dan bansos saat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyaluran Hibah dan Bansos.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, anggaran, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan teknis dan pembinaan dibidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pendapatan; perencanaan dan anggaran, bidang akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah.
- c. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai : (1). SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan (2). SKPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Sebagaimana Pasal (7), Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas: (1). menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; (2). menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; (3). melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(4). melaksanakan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah); (5). menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan (6). melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Dalam menjalankan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah) pada Pasal (7), Ayat (1), Angka (4) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : (1). menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; (2). Mengesahkan DPA-SKPD/DPP A-SKPD; (3).melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; (4). memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; (5). melaksanakan pemungutan pajak daerah; (6). menetapkan SPD; (7). menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; (8). melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; (9). menyajikan informasi keuangan daerah; dan (10). melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Sedangkan selaku kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam Pasal (5), Ayat (3) huruf (c) sebagaimana ketentuan diatas, mempunyai tugas: (1). menyusun RKA-SKPD; (2). menyusun DPA-SKPD; (3). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; (4). melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; (5). melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; (6). melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; (7). mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; (8). menandatangani SPM; (9). mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; (10). mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; (11). menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; (12). mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; (13). Melaksanakan tugas-

tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan (14). bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut diatas ada beberapa isu penting (Isu Strategis) yaitu :

- 1) Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.
- 2) Belum Optimalnya Penerapan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Belum Optimalnya Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan penata-usahaan perbendaharaan
- 5) Belum optimalnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah.
- 6) Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Masih Belum Optimal.

2.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Renja SKPD Tahun 2019 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Renstra Badan Keuangan Daerah.

Semua Program dan kegiatan yang sesuai RENSTRA Badan Keuangan Daerah Pengukuran Pencapaian Sasarannya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

RANCANGAN AWAL						ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2019		NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
				Target Kinerja	Anggaran					Target Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pelayanan Administrasi Perkantoran						Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 Tahun	151,200,000	1	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 Tahun	151,200,000
	2. Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD			34,700,000		2. Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD			34,700,000
	3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD			14,000,000		3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD			14,000,000
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	SKPD			226,450,000		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	SKPD			226,450,000
	5. Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran	SKPD			305,150,000		5. Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran	SKPD			305,150,000
	6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD			938,000,000		6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD			938,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur						Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur					
1	7. Pembangunan gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Buah	949,850,000	1	7. Pembangunan gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Buah	949,850,000
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	198,959,400		8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	198,959,400
	9. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD			68,350,000			9. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			SKPD
	10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	174,000,000		10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	174,000,000
Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah						Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah					
	11. Majelis TP - TGR	SKPD	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	1 Tahun	16,050,000		11. Majelis TP - TGR	SKPD	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	1 Tahun	16,050,000
Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	12. Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok	5,000,000		12. Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok	5,000,000
	13. Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok.	5,000,000		13. Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok.	5,000,000
Peingkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah						Peingkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah					
2	1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS	273 Dok	17,360,000	2	1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS	273 Dok	17,360,000
	2. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN	21 Dok	6,120,000		2. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN	21 Dok	6,120,000
	3. Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perbub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	54,660,000		3. Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perbub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	54,660,000
	4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	42,478,000		4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	42,478,000
	5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	1 Dok	123,420,000		5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	1 Dok	123,420,000
Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah						Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah					
1	1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda	73 PA/KPA	30,800,000	1	1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda	73 PA/KPA	30,800,000
			Jumlah Daftar Gaji Pegawai yang diterbitkan tepat waktu	12 Kali					Jumlah Daftar Gaji Pegawai yang diterbitkan tepat waktu	12 Kali	
2	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu	100%	40,700,000	2	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu	100%	40,700,000

RANCANGAN AWAL					ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2019		NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
				Target Kinerja	Anggaran					Target Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah					Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah						
1.	Penyusunan Dokumen DPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPA	370 Dokumen	44,870,000	1.	Penyusunan Dokumen DPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPA	370 Dok	44,870,000
2.	Bimtek Penyusunan RKA SKPD	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA	73 Org	13,750,000	2.	Bimtek Penyusunan RKA SKPD	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA	73 Org	13,750,000
3.	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 Dok	107,648,000	3.	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 Dok	107,648,000
4.	Penyusunan Dokumen DPPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	74	49,260,000	4.	Penyusunan Dokumen DPPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	74	49,260,000
5.	Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	SKPD	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS	273 Sekolah	50,475,000	5.	Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	SKPD	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS	273 Sekolah	50,475,000
6.	Penyusunan Rancangan APBD	SKPD	Jumlah Dokumen APBD	6 Dok	87,900,000	6.	Penyusunan Rancangan APBD	SKPD	Jumlah Dokumen APBD	6 Dok	87,900,000
7.	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	SKPD			109,375,000	7.	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	SKPD			109,375,000
8.	Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	SKPD	Jumlah Pergeseran APBD	3 Dok	254,700,000	8.	Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	SKPD	Jumlah Pergeseran APBD	3 Dok	254,700,000
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD						
1.	Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD	4 Kali	183,575,000	1.	Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD	4 Kali	183,575,000
2.	Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	SKPD	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm	25 Persil	832,100,000	2.	Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	SKPD	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm	25 Persil	832,100,000
			Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Fisik	75 Persil					Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Fisik	75 Persil	
3.	Peningkatan Manajemen Aset /BMD	SKPD	Jumlah BMD yang dimusnahkan	500 Item Barang	129,575,000	3.	Peningkatan Manajemen Aset /BMD	SKPD	Jumlah BMD yang dimusnahkan	500 Item Barang	129,575,000
			Jumlah Jenis BMD yang dipindahtanggankan	2 Jenis					Jumlah Jenis BMD yang dipindahtanggankan	2 Jenis	
4.	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dok	48,450,000	4.	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dok	48,450,000
5.	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan	56 Buah	1,249,725,000	5.	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan	56 Buah	1,249,725,000
6.	Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi	3 Buah	587,100,000	6.	Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi	3 Buah	587,100,000
Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan					Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan						
1.	Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah	SKPD	Jumlah objek -Objek Pajak Daerah	50 WP	5,451,000	1.	Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah	SKPD	Jumlah objek -Objek Pajak Daerah	50 WP	5,451,000
2.	Penyediaan Karcis dan Blanko	SKPD	Jumlah Jenis Karcis dan Blanko Pajak dan Retribusi Daerah	73 Jenis	152,936,500	2.	Penyediaan Karcis dan Blanko	SKPD	Jumlah Jenis Karcis dan Blanko Pajak dan Retribusi Daerah	73 Jenis	152,936,500
3.	Promosi Pajak Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Dana Perimbangan	4 Kali	231,100,000	3.	Promosi Pajak Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Dana Perimbangan	4 Kali	231,100,000
Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB					Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB						
1.	Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	67.328 WP	274,297,000	1.	Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	67.328 WP	274,297,000
2.	Pelayanan PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu	67.328 Lbr	90,800,000	2.	Pelayanan PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu	67.328 Lbr	90,800,000
3.	Promosi PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Promosi PBB - P2 dan BPHTB	2 Kali	356,290,000	3.	Promosi PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Promosi PBB - P2 dan BPHTB	2 Kali	356,290,000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Renstra SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tujuan dan sasaran.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Meningkatkan Pelayanan Publik

3.2.2 Sasaran

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Meningkatnya Pelayanan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut diatas, dan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka secara rinci program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

**Daftar Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kab.HSS
Tahun 2019**

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
			Target Kinerja	Anggaran
2		4	5	6
<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>				
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 Tahun	151,200,000
2.	Penyediaan Makanan dan Minuman			34,700,000
3.	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD			14,000,000
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran			226,450,000
5.	Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran			305,150,000
6.	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan			938,000,000
<i>Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur</i>				
7.	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Buah	949,850,000
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	198,959,400
9.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68,350,000
10.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	174,000,000
<i>Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</i>				
11.	Majelis TP - TGR	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	1 Tahun	16,050,000
<i>Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>				
12.	Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok	5,000,000
13.	Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok.	5,000,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
		Target Kinerja	Anggaran
2	4	5	6
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah			
1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS	273 Dok	17,360,000
2. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN	21 Dok	6,120,000
3. Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranc. Perbub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	54,660,000
4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	42,478,000
5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	1 Dok	123,420,000
Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah			
1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda	73 PA/KPA	30,800,000
	Jumlah Daftar Gaji Pegawai yang diterbitkan tepat waktu	12 Kali	
2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu	100%	40,700,000
Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah			
1. Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA	370 Dokumen	44,870,000
2. Bimtek Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA	73 Org	13,750,000
3. Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 Dok	107,648,000
4. Penyusunan Dokumen DPPA	Jumlah Dokumen DPPA	74	49,260,000
5. Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS	273 Sekolah	50,475,000
6. Penyusunan Rancangan APBD	Jumlah Dokumen APBD	6 Dok	87,900,000
7. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD			109,375,000
8. Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	Jumlah Pergeseran APBD	3 Dok	254,700,000
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD			
1. Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD	4 Kali	183,575,000
2. Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm	25 Persil	832,100,000
	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Fisik	75 Persil	
3. Peningkatan Manajemen Aset /BMD	Jumlah BMD yang dimusnahkan	500 Item Barang	129,575,000
	Jumlah Jenis BMD yang dipindahtangankan	2 Jenis	
4. Penyusunan RKBMD dan RKPMBD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPMBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dok	48,450,000
5. Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan	56 Buah	1,249,725,000
6. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi	3 Buah	587,100,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2019		
		Target Kinerja	Anggaran	
2	4	5	6	
Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan				
1.	Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah	Jumlah objek -Objek Pajak Daerah	50 WP	5,451,000
2.	Penyediaan Karcis dan Blanko	Jumlah Jenis Karcis dan Blangko Pajak dan Retribusi Daerah	73 Jenis	152,936,500
3.	Promosi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Dana Perimbangan	4 Kali	231,100,000
Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB				
1.	Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB	Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	67.328 WP	274,297,000
2.	Pelayanan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu	67.328 Lbr	90,800,000
3.	Promosi PBB dan BPHTB	Jumlah Promosi PBB - P2 dan BPHTB	2 Kali	356,290,000

BAB IV

PENUTUP

Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019. Renja SKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2019 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, selanjutnya mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap menerapkan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Badan Keuangan Daerah akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam Renja SKPD TA.2019, dalam kaitan itu, diharapkan DPRD bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja TA.2019 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

**EVALUASI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
						Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Predikat AKIB	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		82		APBD		82		
			1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 Tahun	151,200,000	APBD		1 Tahun	151,200,000		
			2. Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD			34,700,000	APBD			34,700,000		
			3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD			14,000,000	APBD			14,000,000		
			4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	SKPD			226,450,000	APBD			226,450,000		
			5. Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran	SKPD			305,150,000	APBD			305,150,000		
			6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD			938,000,000	APBD			938,000,000		
			<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		82					82	
			7. Pembangunan gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Buah	949,850,000	APBD			1 Buah	949,850,000	
			8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	198,959,400	APBD		1 Tahun	198,959,400		
			9. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD			68,350,000	APBD			68,350,000		
			10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	174,000,000	APBD		1 Tahun	174,000,000		
			<i>Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		82					82	
			11. Majelis TP - TGR	SKPD	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	1 Tahun	16,050,000	APBD			1 Tahun	16,050,000	
<i>Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>		<i>Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP dan Keuangan</i>		100%					100%				
12. Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok	5,000,000	APBD			1 Dok	5,000,000				
13. Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok.	5,000,000	APBD			1 Dok.	5,000,000				
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	Opini WTP BPK terhadap LKPD	<i>Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah</i>		<i>Persentasi Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas</i>		100%				100%		
			1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS	273 Dok	17,360,000	APBD		273 Dok	17,360,000		
			2. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN	21 Dok	6,120,000	APBD		21 Dok	6,120,000		
			3. Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	54,660,000	APBD		2 Dok	54,660,000		
			4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	42,478,000	APBD		2 Dok	42,478,000		
			5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	1 Dok	123,420,000	APBD		1 Dok	123,420,000		
			<i>Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah</i>		<i>Persentasi Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>		100%					100%	
			1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda	73 PA/KPA	30,800,000	APBD		73 PA/KPA	30,800,000		
					Jumlah Daftar Gaji Pegawai yang diterbitkan tepat waktu	12 Kali				12 Kali	-		
2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu	100%	40,700,000	APBD		100%	40,700,000					

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
						Target Capaian Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah		Lama Waktu Penyusunan RAPBD	7 Bulan					7 Bulan		
			1. Penyusunan Dokumen DPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPA	370 Dokumen	44,870,000	APBD			370 Dokumen	44,870,000	
			2. Bimtek Penyusunan RKA SKPD	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA	73 Org	13,750,000	APBD			73 Org	13,750,000	
			3. Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 Dok	107,648,000	APBD			4 Dok	107,648,000	
			4. Penyusunan Dokumen DPPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	74	49,260,000	APBD			7400%	49,260,000	
			5. Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	SKPD	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penvusunan RKAS	273 Sekolah	50,475,000	APBD			273 Sekolah	50,475,000	
			6. Penyusunan Rancangan APBD	SKPD	Jumlah Dokumen APBD	6 Dok	87,900,000	APBD			6 Dok	87,900,000	
			7. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	SKPD			109,375,000	APBD			0%	109,375,000	
			8. Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	SKPD	Jumlah Pergeseran APBD	3 Dok	254,700,000	APBD			3 Dok	254,700,000	
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD		Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan		100%					100%	
			1. Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD	4 Kali	183,575,000	APBD			4 Kali	183,575,000	
			2. Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	SKPD	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm (serifikat)	25 Persil	832,100,000	APBD			25 Persil	832,100,000	
						Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Fisik (Pasang Patok)					75 Persil		75 Persil
			3. Peningkatan Manajemen Aset /BMD	SKPD	Jumlah BMD yang dimusnahkan	500 Item Barang	129,575,000	APBD			500 Item Barang	129,575,000	
					Jumlah Jenis BMD yang dipindahtangankan	2 Jenis					2 Jenis		
			4. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dok	48,450,000	APBD			2 Dok	48,450,000	
5. Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan	56 Buah	1,249,725,000	APBD			56 Buah	1,249,725,000				
6. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi	3 Buah	587,100,000	APBD			3 Buah	587,100,000				
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentasi peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan		Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan retribusi	20,608,163,764.38				20,608,163,764.38			
			1. Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah	SKPD	Jumlah objek -Objek Pajak Daerah	50 WP	5,451,000	APBD			50 WP	5,451,000	
			2. Penyediaan Karcis dan Blanko	SKPD	Jumlah Jenis Karcis dan Blangko Pajak dan Retribusi Daerah	73 Jenis	152,936,500	APBD			73 Jenis	152,936,500	
			3. Promosi Pajak Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Dana Perimbangan	4 Kali	231,100,000	APBD			4 Kali	231,100,000	
			Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB		Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB		1,406,055,770.26				1,406,055,770.26		
			1. Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	67.328 WP	274,297,000	APBD			67.328 WP	274,297,000	
			2. Pelayanan PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu	67.328 Lbr	90,800,000	APBD			67.328 Lbr	90,800,000	
			3. Promosi PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Promosi PBB - P2 dan BPHTB	2 Kali	356,290,000	APBD			2 Kali	356,290,000	